Dampak Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, dan PDRB Terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Muhamad Fikri Nur Afrizal[1], Catur Martian Fajar[2], Yunika Komalasari[3]
[1]Universitas BSI
cm.fajar91@gmail.com

ABSTRAK

Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang berguna untuk membiayai segala bentuk kegiatan pemerintah daerah, salah satu bagian dari pajak daerah adalah pajak hotel. Pajak hotel merupakan salah satu pajak yang berhubungan dengan sektor pariwisata, maka faktor seperti jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan PDRB dapat mempengaruhi penerimaan pajak hotel.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan PDRB terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan tipe penelitian deskriptif verifikatif melalui pendekatan kuantitatif. Data penelitian terdiri dari laporan target dan realisasi pajak hotel tahun 2011-2017, data jumlah wisatawan tahun 2011-2017, data jumlah hotel tahun 2011-2017, dan PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2011-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah wisatawan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel, jumlah hotel tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel, PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak hotel, dan secara simultan jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel.

Kata Kunci : Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, PDRB, Penerimaan Pajak Hotel

ABSTRACT

Regional tax is one of the regional revenue that is useful to finance all forms of local government activities, one part of regional tax is hotel tax. Hotel tax is one tax that is related to the tourism sector, so factors such as the number of tourists, the number of hotels, and GRDP can affect hotel tax revenue. The purpose of this study is to determine the effect of the number of tourists, hotels, and GRDP on hotel tax revenue in the city. Bandung. The research method used in this study is a survey method with a type of descriptive research verification through a quantitative approach. The research data consisted of a target report and realization of hotel tax in 2011-2017, data on the number of tourists in 2011-2017, data on the number of hotels in 2011-2017, and GRDP based 2010 constant price in 2011-2017. The results showed that the number of tourists had no effect on hotel tax receipts, the number of hotels did not affect hotel tax revenue, the GRDP had a significant effect on hotel tax revenue, and simultaneously the number of tourists, the number of hotels and GRDP had a significant effect on hotel tax revenue.

Keywords: *Number of Tourists, Number of Hotels, GRDP, Hotel Tax Revenue*

Naskah diterima : Juli 2019 Naskah direvisi : Juli 2019 Naskah diterima : Agustus 2019

PENDAHULUAN

Setelah pemerintah pusat memberlakukan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, maka pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dari mulai Provinsi, Kota, dan Kabupaten untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan kepentingan masyaraka setempat. Pemerintah daerah berkesempatan untuk membuat rencana keuangan daerahnya sendiri dari mulai pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan, sampai dengan pinjaman daerah.

Dengan adanya otonomi daerah pemerintah dituntut untuk mengembangkan potensi sumber daya yang ada didaerah tersebut guna terciptanya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Wertianti & Dwirandra, 2013). Otonomi daerah memberikan manfaat bagi masyakat yaitu dengan adanya pembangunan didaerah (Wati & Fajar, 2017). Fokus pembangunan didaerah adalah meningkatkan kapasitas ekonomi dan kualitas manusia yang sekarang dan yang akan datang (Wildan, 2018).

Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pengeluaran atau belanja pemerintah daerah dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) setiap satu tahun anggaran (Onibala, Ilat, & Kalangi, 2014). Pemerintah daerah dituntut oleh pemerintah pusat untuk menggali potensi daerahnya secara maksimal (J.R.Walakandou, 2013). Pemerintah daerah harus mulai mengurangi ketergantungan pada bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat (Nugraha & Muid, 2012).

Saat ini pemerintah daerah masih belum bisa lepas dengan dana sumbangan dari pemerintah pusat (J.R.Walakandou, 2013). pemerintah daerah harus mandiri karena tidak semua sumber pembiayaan pemerintah pusat diberikan kepada pemerintah daerah (Nurdin & Riana, 2013). Dana alokasi umum berasal dari APBN dengan tujuan untuk diberikan kepada pemerintah daerah untuk pemerataan keuangan antar daerah dan untuk membiayai kepentingan daerah (Wandira, 2013).

Pejabat pemerintah wajib untuk memperhatikan pengelolaan keuangan daerah yang sedang berjalan agar tercapainya kinerja yang maksimal (Safwan, Nadirsyah, & Abdullah, 2014). Pejabat yang melakukan pengelolaan keuangan pemerintah harus memperhatikan dan menerapkan asas-asas hukum tertentu. Demi mencapai pelayanan dan pengelolaan keuangan pemerintah meningkat (Rachmat, 2010). Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu bentuk pengelolaan keuangan daerah harus digali potensinya secara maksimal (Nugraha & Muid, 2012).

Sumber-sumber keuangan tersebut harus memadai dan cukup guna untuk membiayai urusan rumah tangga daerah itu sendiri (Bernardin, 2017). Pendapatan daerah bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk membangun wilayahnya sendiri baik itu infrastruktur maupun non infrastruktur untuk keperluan masyarakat (Bernardin & Sofyan, 2017).

Pajak daerah sebagai salah satu bagian dari pendapatan asli daerah, dimana pajak daerah menjadi penyumbang terbesar sumber dana dibandingkan dengan pendapatan yang lainnya (Handayani & Nuraina, 2012). Pajak daerah berguna bagi pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah (Mikha, 2010). Selain itu pajak daerah juga berguna untuk menekan inflasi (Bernardin, 2017). Pajak daerah sangat penting bagi pemerintah daerah, maka pemerintah daerah harus mendahulukan kepentingan rakyatnya dan bertindak adil dalam mengambil keputusan yang menyangkut dengan pajak daerah (Kusuma & Wirawati, 2013).

Pajak hotel termasuk didalam pajak daerah yang menjadi wewenang kota/kabupaten (Adam, 2013). Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009, menjelaskan bahwa pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pajak hotel dipungut di tempat dimana hotel tersebut berlokasi (Alista, 2014).

Sektor pariwisata sebagai salah satu bagian dari pendapatan daerah yang sangat diperlukan oleh pemerintah daearah (Supit, Kumenaung, & Tumilaar, 2015). Letak geografis suatu daerah menjadi salah satu penentu berkembangnya potensi pariwisata (Suleman, 2018). Ciri khas dan karakteristik setiap daerah berbeda, maka dari itu pemerintah daerah harus mengembangkan potensi tersebut (Bagus & Purbadharmaja, 2019).

Kunjungan wisatawan sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah daerah yang bergantung pada sektor pariwisata (Dewi & Bendesa, 2013). Jumlah kunjungan wisatawan akan membantu perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah (Widiana & Sudiana, 2015). Wisatawan yang melakukan perjalan di suatu daerah akan membeli barang untuk keperluannya maupun untuk oleh-oleh (Roostika, 2012).

Hotel merupakan perusahaan yang dikelola oleh seseorang yang memberikan pelayanan makanan, minuman, dan kamar untuk menginap kepada orang yang sedang berkunjung dan mampu membayar sesuai dengan palayanan yang diterimanya (Moha & Loindong, 2016). Akomodasi sangat penting bagi wisatawan yang sedang berkunjung ke suatu daerah (Sumarabawa, 2013). Akomodasi yang memiliki fasilitas yang baik akan mampu menarik wisatawan untuk datang kembali (Azizah, 2012).

Pendapatan nasional merupakan pendapatan yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi (Murni, 2013). Pendapatan nasional menjadi salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu Negara (Naf'an, 2014). Pemerintah pusat saat ini sedang fokus pada pembangunan nasional (Mulyanti & Sunardjo, 2019).

Pembangunan nasional mendorong berkembangnya pembangunan daerah (regional) (Adisasmita, 2013). Pembangunan menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi daerah (Wildan, 2018). Pemerintah daerah harus memperhatikan pembangunan yang ada di daerah (Aliandi & Handayani, 2013). Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun di suatu wilayah atau daerah (Sutrisno, 2013).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alista (2014) yang meneliti pengaruh jumlah wisatawan, laju inflasi, dan PDRB terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Tulungagung. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel, sedangkan jumlah wisatawan dan inflasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan pajak hotel.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Adam (2013) yang meneliti pengaruh jumlah wisatawan dan jumlah hotel terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Manado. Hasilnya menunjukkan bahwa jumlah hotel berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel, sedangkan jumlah wisatawan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Aliandi & Handayani (2013) yang meneliti pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hotel dan tingkat hunian hotel terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa jumlah wisatawan dan tingkat hunian hotel berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel, sedangkan jumlah hotel tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel.

KAJIAN LITERATUR

Wisatawan

Undang-undang No.10 tahun 2009 tentang kepariwisataan pasal 1 menyebutkan bahwa wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. WTO (*Word Trade Organization*) menjelaskan definisi wisatawan merupakan setiap orang yang bertempat tinggal di suatu negara tanpa memandang kewarganegaraannya,

berkunjung ke suatu tempat pada negara yang sama untuk jangka waktu lebih dari 24 jam yang tujuan perjalanannya dapat diklasifikasikan pada salah satu hal berikut ini: memanfaatkan waktu luang untuk berkreasi, liburan, kesehatan, pendidikan, dan olah raga , bisnis untuk mengunjungi kaum keluarga (Suryadana & Octavia, 2015). Wisatawan terdiri dari 2 jenis yaitu wisatawan domestik dan mancanegara (Alan, Ethiika, & Puttri, 2016).

Definisi wisatawan mancanegara adalah orang yang sedang melakukan perjalanan atau kunjungan pada Negara yang bukan Negara asalnya untuk berlibur, berobat, berbisnis, berolahraga serta menuntut ilmu (Alista, 2014). Wisatawan mancanegara bisa dilihat dari status kewarganegaraannya, dokumen perjalanannya, dan jenis uang yang dibelanjakan (Suryadana & Octavia, 2015). Seseorang masuk ke dalam kategori wisatawan apabila orang tersebut berada di dalam suatu Negara yang bukan Negara asalnya serta melakukan perjalanan dalam jangka waktu 24 jam dan maksimal 3 bulan di Negara tersebut (Dewi & Bendesa, 2013). Definisi wisatawan domestik adalah orang yang sedang melakukan wisata di wilayah negara tempat dia tinggal (Maulana, 2016). Seorang wisatawan dikatakan wisatawan domestik apabila wisatawan tersebut melakukan perjalanan wisata dalam batas wilayah negaranya sendiri tanpa melewati perbatasan negaranya (Suryadana & Octavia, 2015).

Kunjungan wisatawan pada suatu Daerah Tujuan Wisata (DTW) memberikan dampak terhadap warga setempat (Rahma & Handayani, 2013). Wisatawan yang sedang berkunjung ke suatu daerah akan membutuhkan barang dan jasa di daerah tersebut (Widyaningsih & Budhi, 2014). Para wisatawan biasanya akan berkunjung lebih dari 1 tujuan objek wisata (Sudiana, 2016).

Faktor budaya menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia (Kirom, Sudarmiatin, & Putra, 2016). Wisata alam pun menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan mancanegara maupun domestik untuk menjelajahi wilayah yang ada di Indonesia (Sumarabawa, 2013). Wisatawan menjadi penting bagi suatu negara/wilayah untuk mengukur keberhasilan negara tersebut dalam mengelola destinasi wisata (Hanif, Kusumawati, & Kholid Mawardi, 2016).

Hotel

Sarana akomodasi (penginapan) dapat diartikan sebagai bangunan dalam bentuk apapun yang memiliki kamar-kamar tidur untuk menginap, baik dengan tambahan pelayanan makanan dan minuman atau tidak (Rachmadi, 2017). Akomodasi meliputi berbagai macam hotel dan berbagai macam jenis fasilitas lain yang berhubungan dengan pelayanan untuk para wisatawan yang berniat untuk bermalam selama perjalanan wisata yang mereka lakukan (Suryadana & Octavia, 2015). Usaha penginapan (akomodasi) atau sering juga disebut *lodging establishment* merupakan tempat bagi seseorang untuk tinggal sementara, dapat berupa hotel, losmen, resort, apartement dan sebagainya (Herman, Brahmanto, & Hamzah, 2018).

Jasa penginapan atau hotel sangat dibutuhkan oleh industri pariwisata yang semakin berkembang (Susepti, Hamid, & Kusumawati, 2017). Hotel merupakan jenis akomodasi yang dikelola secara komersial dan professional, disediakan bagi setiap orang yang ingin mendapatkan pelayanan penginapan, makanan dan minuman, hiburan seperti *night club*, *discotheque*, serta pelayanan menarik lainnya (Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan) (Herman, Brahmanto, & Hamzah, 2018). Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009, menjelaskan Pengertian hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Hotel merupakan bangunan khusus disediakan bagi orang untuk menginap/beristirahat termasuk memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan dikenakan bayaran (Udayantini, Bagia, & Suwendra, 2015).

PDRB

Pertumbuhan ekonomi sangat erat kaitannya dengan nilai tambah produksi atau kenaikan pendapatan perkapita (Suliswanto, 2010). Pertumbuhan ekonomi erat hubungannya dengan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk skala nasioanl dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk skala provinsi atau kabupaten/kota (Nurmainah, 2013). PDRB merupakan bagian dari PDB, ketika PDRB mengalami penurunan atau peningkatan maka akan berpengaruh terhadap PDB (Mawarni, Darwanis, & Abdullah, 2013).

PDB merupakan nilai barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam suatu periode tertentu dengan menggunakan faktor produksi miliki warganegaranya dan milik warganegara lain (Dama, Lapian, & Sumual, 2016). PDRB merupakan nilai tambah untuk barang ataupun jasa yang didapatkan oleh wilayah/daerah (Alista, 2014). PDRB merupakan jumlah dari keseluruhan produk yang dihasilkan oleh suatu wilayah/daerah dalam suatu periode (Alhudhori, 2017).

PDRB dapat digunakan untuk menghitung perubahan harga dengan menggunakan perhitungan deflator PDRB (merupakan rasio antara harga berlaku dan harga konstan) (Sutrisno, 2013). PDRB merupakan salah satu cara untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu wilayah/daerah (Mirza, 2012). Tujuan dari pembangunan ekonomi didaerah adalah meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi didaerah (Laisina, Masinambow, & Rompas, 2015).

Pertumbuhan ekonomi wilayah/daerah merupakan pertambahan pendapatan seluruh masyarakat yang berada di wilayah/daerah tersebut (Rasyid, 2016). Semakin tinggi nilai PDRB disuatu daerah maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut (Alista, 2014). PDRB menjadi tolak ukur bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan kedepannya (Laisina et al., 2015)

Capaian pembangunan daerah dapat dilihat dengan jelas melalui angka yang terdapat di dalam PDRB (Maharani, 2016). PDRB dapat dilihat melalui 2 perhitungan yaitu menurut lapangan usaha dan penggunaan (Susanti, 2013). PDRB dapat menggunakan perhitungan atas dasar harga berlaku atau atas dasar harga konstan (Sutrisno, 2013).

Pajak Hotel

Sektor pariwisata menjadi bagian utama dari pendapatan nasional di Yunani (Thompson & Thompson, 2010). Pariwisata menjadi salah satu sektor jasa terpenting bagi negara Singapura (Meng, Siriwardana, & Pham, 2013). Telah banyak negara di dunia mengembangkan industri pariwisata, karena potensi pariwisata berguna untuk perekonomian nasional melalui pendapatan valuta asing (Richard & Cleveland, 2016).

Pariwisata menjadi salah satu penyumbang devisa negara (Chang, Lu, & Hu, 2011). Kegiatan pariwisata selalu dikenakan pajak tidak langsung (Gago, Labandeira, Picos, & Rodrı, 2009). Di Portugal khususnya daerah Algarve, pemerintah memberlakukan pajak pariwisata agar mengurangi pengrusakan lingkungan (Oom, Pintassilgo, Matias, & André, 2012).

Di beberapa negara seperti Bhutan, Dominika, Kepulauan Balearic (Spanyol), Venesia dan Florence yang memanfaatkan pajak dan biaya pariwisata sebagai alat kebijakan lingkungan (Rey-Maquieira, Lozano, & Gómez, 2009). Salah satu praktik yang umum didunia agar para turis tidak perlu mengeluarkan biaya karena dikenakan pajak baru adalah dengan adanya kontrak jangka panjang antara penyedia tur dan hotel (Gago et al., 2009). Industri pariwisata bermanfaat untuk pendapatan pajak, peningkatan lapangan kerja, dan sumber pendapatan tambahan (Chen, 2011).

Pajak hotel merupakan salah satu pajak di sektor pariwisata (Gago et al., 2009). Pajak hotel dikenakan atas penyewaan kamar diperusahaan penginapan (Toma, Mcgrath, & Payne, 2016). Persaingan yang terus berkembang di antara penyedia hotel dan tekanan terus menerus yang di dapatkan dari kejenuhan pasar telah mengharuskan perlunya kontrol kinerja

yang lebih besar di industri hotel (Assaf, Josiassen, Woo, Agbola, & Tsionas, 2017).

Pendapatan sektor pariwisata merupakan bagian dari pendapatan asli daerah yang berasal dari kegiatan pariwisata didalamnya terdapat retribusi dan pajak seperti hotel, restaurant dan yang lainnya (Udayantini et al., 2015). Di Indonesia pajak atas hotel diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang didalamnya menjelaskan bahwa pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian survey dengan tipe penelitian deskriptif dan verifikatif.

Sumber Data

Sumber Data yang digunakan pada penelitian ini berasal dari data sekunder yang telah diolah oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, dan Badan Pusat Statistik Kota Bandung. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling.*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Korelasi

Berikut ini adalah hasil analisis korelasi jumlah wisatawan, jumlah hotel dan PDRB terhadap penerimaan pajak hotel

Tabel 1.
Hasil Analisis Korelasi

	Logpenerimaan_pajak_hotel
Logpenerimaan_pajak_hotel	1
Logjumlah_wisatawan	,419
Logjumlah_hotel	,462
Logpdrb	,988
Sig.(1-tailed)	
Logpenerimaan_pajak_hotel	.
Logjumlah_wisatawan	,175
Logjumlah_hotel	,148
Logpdrb	,000

Sumber : Data sekunder diolah (2019)

Hasil Korelasi Parsial Jumlah Wisatawan terhadap Penerimaan Pajak Hotel. Berdasarkan analisis tabel 1 dapat dilihat, diperoleh angka koefisien korelasi antara jumlah wisatawan dengan penerimaan pajak hotel adalah sebeser 0,419 dengan arah positif. Artinya jumlah wisatawan memiliki hubungan yang cukup kuat dengan penerimaan pajak hotel. Tanda positif menunjukkan bahwa ketika jumlah wisatawan meningkat, maka penerimaan pajak hotel meningkat. Korelasi X1 jumlah wisatawa tidak signifikan karena angka signifikansi (sig) penelitian 0,175> 0,05.

Hasil Korelasi Parsial Jumlah Hotel terhadap Penerimaan Pajak Hotel. Berdasarkan analisis tabel 1. dapat dilihat, diperoleh angka koefisien korelasi antara jumlah hotel dengan penerimaan pajak hotel adalah sebeser 0,462 dengan arah positif. Artinya jumlah hotel memiliki hubungan yang cukup kuat dengan penerimaan pajak hotel. Tanda positif menunjukkan bahwa ketika jumlah hotel meningkat, maka penerimaan pajak hotel meningkat. Korelasi X2 jumlah hotel Korelasi tidak signifikan karena angka signifikansi (sig) penelitian 0,148> 0,05.

Hasil Korelasi Parsial PDRB terhadap Penerimaan Pajak Hotel. Berdasarkan analisis tabel 1 dapat dilihat, diperoleh angka koefisien korelasi antara PDRB dengan penerimaan pajak hotel adalah sebeser 0,988 dengan arah positif. Artinya jumlah PDRB memiliki hubungan yang sangat kuat dengan penerimaan pajak hotel. Tanda positif menunjukkan bahwa ketika PDRB meningkat, maka penerimaan pajak hotel meningkat. Korelasi X3 PDRB bersifat signifikan karena angka signifikansi (sig) penelitian sebesar 0,000<0,05.

Tabel 2.
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

odel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-4,015	2,272		-1,767	,175
LOG_jumlah_wisatawan	-,435	,406	-,140	-1,072	,362
LOG_jumlah_hotel	-,213	,503	-,053	-,424	,700
LOG_pdrb	2,309	,282	1,081	8,182	,004

Sumber : Data sekunder diolah (2019)

Pengaruh Jumlah Wisatawan terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Berdasarkan tabel 2 diperoleh hasil nilai t hitung yang kemudian akan dibandingkan dengan nilai t tabel. T tabel diperoleh dari t(α/2 ; n-k-1) berarti (0,025 ; 3) nilai t tabel =3,182

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai *standardized coefficients beta* yaitu -0,140 adalah besarnya pengaruh secara parsial jumlah wisatawan terhadap penerimaan pajak hotel.

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa HA ditolak dan H0 diterima karena t hitung sebesar -1,072 dengan arah negatif. Hasil uji pengaruh jumlah wisatawan (X1) terhadap penerimaan pajak hotel (Y) diperoleh t hitung lebih kecil dari t tabel (-1,072 < 3,182). Hal ini mengindikasi bahwa jumlah wisatawan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel.

Pengaruh Jumlah Hotel terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Berdasarkan tabel 2 diperoleh hasil nilai t hitung yang kemudian akan dibandingkan dengan nilai t tabel. T tabel diperoleh dari t(α/2 ; n-k-1) berarti (0,025 ; 3) nilai t tabel = 3,182

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai *standardized coefficients beta* yaitu -0,053 adalah besarnya pengaruh secara parsial jumlah hotel terhadap penerimaan pajak hotel.

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa HA ditolak dan H0 diterima karena t hitung sebesar -0,424 dengan arah negatif. Hasil uji pengaruh jumlah hotel (X2) terhadap penerimaan pajak hotel (Y) diperoleh t hitung lebih kecil dari t tabel (-0,424 < 3,182). Hal ini mengindikasi bahwa jumlah hotel secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel.

Pengaruh PDRB Terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Berdasarkan tabel 2 diperoleh hasil nilai t hitung yang kemudian akan dibandingkan dengan nilai t tabel. T tabel diperoleh dari t(α/2 ; n-k-1) berarti (0,025 ; 3) nilai t tabel = 3,182

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai *standardized coefficients beta* yaitu 1,081 adalah besarnya pengaruh secara parsial PDRB terhadap penerimaan pajak hotel.

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa HA diterima dan H0 ditolak karena t hitung sebesar 8,182 dengan arah negatif. Hasil uji pengaruh PDRB (X3) terhadap penerimaan pajak hotel (Y) diperoleh t hitung lebih besar dari t tabel (8,182 > 3,182). Hal ini mengindikasi bahwa jumlah wisatawan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel.

Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, dan PDRB terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Berikut ini adalah hasil analisis jumlah wisatawan, jumlah hotel dan PDRB secara simultan terhadap penerimaan pajak hotel

Tabel 3.
Hasil Analisis Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,133	3	,044	65,950	,003[b]
	Residual	,002	3	,001		
	Total	,135	6			

Sumber : Data sekunder diolah (2019)

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai F hitung adalah sebesar 0,133 untuk mengetahui pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan PDRB terhadap penerimaan pajak hotel secara simultan dengan menggunakan tingkat kepercayaan yaitu α=5% atau 0,05 (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df1=k) maka df1= 3 dan (df2= n-k) maka df2 = 7-3-1= 3 berarti nilai f tabel =9,28. Maka hasil yang diperoleh dari perbandingan f hitung lebih besar dari f tabel yakni 65,950 > 9,28 sehingga pada tingkat kesalahan 5% H0 ditolak maka HA diterima yang artinya secara simultan jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dengan tingkat signifikan 0,003 maka nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Dapat diketahui bahwa jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel

PENUTUP

bertambahnya PDRB diikuti dengan meningkatnya penerimaan pajak hotel.

Variabel jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan PDRB memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak hotel. Jadi variabel jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan PDRB memberikan kontribusi pengaruh yang sangat besar terhadap penerimaan pajak hotel.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukan pengaruh PDRB signifikan terhadap penerimaan pajak hotel membuktikan bahwa produktivitas masyarakat kota bandung meningkat.

Pemerintah daerah Kota Bandung diharapkan dapat memanfaatkan PDRB

Simpulan

Variabel jumlah wisatawan tidak memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak hotel. Semakin bertambahnya jumlah wisatawan tidak diikuti dengan meningkatnya penerimaan pajak hotel. Jumlah wisatawan tidak berpengaruh karena wisatawan yang datang ke kota Bandung tidak semua menginap di hotel, melainkan ada yang menginap di rumah kerabatnya

Variabel jumlah hotel tidak memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak hotel. Semakin bertambahnya jumlah hotel tidak diikuti dengan meningkatnya penerimaan pajak hotel. Jumlah Hotel tidak berpengaruh karena tingkat hunian dan rata rata lama tinggal tamu yang datang ke hotel sangat kurang.

Variabel PDRB memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak hotel. Semakin untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel.

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian berikutnya dengan menambah daerah sampel penelitian dan rentang waktu penelitian sehingga hasil penelitian lebih dapat digeneralisir.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, A. (2013). Hubungan Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, Terhadap Penerimaan Pajak Hotel. *Jurnal Emba (Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi), 1*(3), 664–672.

Adisasmita, Rahardjo. (2013). *Teori-Teori*

Pembangunan Ekonomi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Alan, Y., Ethiika, & Puttri, D. (2016). Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, Dan Pdrb Deflator Terhadap Penerimaan Pajak Hotel. *Kumpulan Artikel Mahasiswa Prodi Akuntansi*, *8*(1), 1–13.

Alhudhori, M. (2017). Pengaruh Ipm, Pdrb Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi. *Journal Of Economics And Business*, *1*(1), 113–124. Https://Doi.Org/10.33087/Ekonomis.V1i1.12

Aliandi, V. D. A., & Handayani, H. R. (2013). Penerimaan Pajak Hotel (Studi Kasus Pada Kota Yogyakarta). *Journal Of Economics*, *2*(4), 1–14.

Alista, H. N. (2014). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Jumlah Penerimaan Pajak Hotel (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb Universitas Brawijaya*, *3*(1), 1–18. Retrieved From Https://Www.Bps.Go.Id/Dynamictable/2018/05/18/1337/Persentase-Panjang-Jalan-Tol-Yang-Beroperasi-Menurut-Operatornya-2014.Html

Assaf, A. G., Josiassen, A., Woo, L., Agbola, F. W., & Tsionas, M. (2017). Destination Characteristics That Drive Hotel Performance : A State-Of- The-Art Global Analysis. *Tourism Management*, *60*, 270–279. Https://Doi.Org/10.1016/J.Tourman.2016.12.010

Azizah. (2012). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Perhotelan Di Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari*, *12*(3), 10–14.

Bagus, I., & Purbadharmaja, P. (2019). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Hotel Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Sawah. *E-Jurnal Ep Unud*, *8*(3), 670–702.

Bernardin, D. E. Y. (2017). Pendapatan Asli Daerah (Pad) Melalui Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb). *Jurnal Ekspansi*, *9*(1), 19–35.

Bernardin, D. E. Y., & Sofyan, I. (2017). Penerimaan Pajak Daerah Melalui Kontribusi Pajak Hotel Dan Hiburan. *Jurnal Ekspansi*, *9*(2), 275–289.

Chang, J. J., Lu, L. J., & Hu, S. W. (2011). Congestion Externalities Of Tourism, Dutch Disease And Optimal Taxation: Macroeconomic Implications. *Economic Record*, *87*(276), 90–108. Https://Doi.Org/10.1111/J.1475-4932.2010.00680.X

Chen, M. (2011). International Journal Of Hospitality Management The Response Of Hotel Performance To International Tourism Development And Crisis Events. *International Journal Of Hospitality Management*, *30*(1), 200–212. Https://Doi.Org/10.1016/J.Ijhm.2010.06.005

Dama, H. Y., Lapian, A. L. C., & Sumual, J. I. (2016). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado (Tahun 2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *16*(3), 549–561.

Dewi, A. A. I. A. D. S., & Bendesa, I. K. G. (2013). Analisis Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan , Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Ep Unud*, *5*(2), 260–275.

Gago, A., Labandeira, X., Picos, F., & Rodrı, M. (2009). Specific And General Taxation Of Tourism Activities . Evidence From Spain. *Tourism Management*, *30*, 381–392. Https://Doi.Org/10.1016/J.Tourman.2

008.08.004

Handayani, D., & Nuraina, E. (2012). Pengaruh Pajak Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun. *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, *1*(32), 1–12.

Hanif, A., Kusumawati, A., & Kholid Mawardi, M. (2016). Pengaruh Citra Destinasi Terhadap Kepuasan Wisatawan Serta Dampaknya Terhadap Loyalitas Wisatawan (Studi Pada Wisatawan Nusantara Yang Berkunjung Ke Kota Batu). *Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)│ Vol*, 38(1), 44-52. Retrieved From Http://Administrasibisnis.Studentjournal.Ub.Ac.Id/Index.Php/Jab/Article/Download/1480/1859.

Herman, Hary. Dkk. (2018). *Pengantar Manajemen Hospitality*. Pekalongan: Pt. Nasya Expanding Management.

J.R.Walakandou, R. (2013). Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Manado. *Emba*, *1*(3), 722–729.

Kirom, N. R, Sudarmiatin, & Putra, I. W. J. A. (2016). Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik Wisata Budaya Dan Pengaruh Terhadap Kepuasan Wisatawan. *Jurnal Pendidikan*, *1*(3), 536-546.

Kusuma, M. K. A. A., & Wirawati, N. G. P. (2013). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pad Sekabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Journal Akuntansi*, *5*(3), 574–585.

Laisina, C., Masinambow, V., & Rompas, W. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap Pdrb Melalui Indeks Pembangunan Manusia Di Sulawesi Utara Tahun 2002-20013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *15*(04), 193–208.

Maharani, D. (2016). Analisis Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Di Sumatera Utara. *Intiqad*, *8*(2), 32-46. Retrieved From Http://Dspace.Uii.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/5352/Jurnalpublikasi.Pdf?Sequence=2&Isallowed=Y

Maulana, A. (2016). Pengaruh Kunjungan Wisatawan Mancanegara Dan Perjalanan Wisatawan Nusantara Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata Di Indonesia. *Jurnal Kepariwisataan Indonesia*, *11*(1), 119–143.

Mawarni, Darwanis, & Abdullah, S. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Aceh). *Jurnal Akuntansi*, *2*(2), 80–90.

Meng, X., Siriwardana, M., & Pham, T. (2013). A Cge Assessment Of Singapore's Tourism Policies. *Tourism Management*, *34*, 25–36. Https://Doi.Org/10.1016/J.Tourman.2012.03.006

Mikha, D. (2010). Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman. *Kajian Akuntansi*, *5*(1), 66–79.

Mirza, D. S. (2012). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal*, *1*(1).

Moha, S., & Loindong, S. (2016). Analisis Kualitas Pelayanan Dan Fasilitas Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Hotel Yuta Di Kota Manado. *Jurnal Emba*, *4*(1), 575–584. Retrieved From Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.

Php/Emba/Article/View/11715

Mulyanti, D., & Sunardjo, V. F. (2019). Implikasi Tingkat Kepatuhan Dan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Ekono Insentif*, *13*(1), 16–26. Retrieved From Https://Jurnal.Lldikti4.Or.Id/Index.Php/Jurnalekono/Article/View/76

Murni, Asfia. (2013). *Ekonomi Makro*. Bandung: Pt. Refika Aditama.

Nugraha, S. A., & Muid, D. (2012). Analisis Pada Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel. *Journal Of Accounting*, *1*(1), 1–13.

Naf'an. (2014). *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Nurdin, S., & Riana, D. (2013). Analisis Perbandingan Penerimaan Pkb Sebelum Dan Sesudah Penerapan Tarif Progresif Dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Bbnkb (Studi Pada Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung Ii Kawaluyaan). *Ecodemica*, *1*(2), 1–14.

Nurmainah, S. (2013). Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah ,Tenaga Kerja Terserap Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (Jbe)*, *20*(2), 131–141.

Onibala, M. A., Ilat, V., & Kalangi, L. (2014). Evaluasi Sistem Dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Belanja Langsung Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa. *Emba*, *2*(2), 1691–1701.

Oom, P., Pintassilgo, P., Matias, A., & André, F. (2012). Tourist Attitudes Towards An Accommodation Tax Earmarked For Environmental Protection : A Survey In The Algarve. *Tourism Management*, *33*(6), 1408–1416. Https://Doi.Org/10.1016/J.Tourman.2012.01.003

Rachmadi, Hari. (2017). *Dokumen Fasilitas Perjalanan*. Yogyakarta: Deepublish.

Rachmat. (2010). *Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: Cv. Pustaka Setia.

Rahma, F.N., & Handayani, H. R. (2013). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Obyek Wisata Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Ekonomi Diponegoro*, 2(2), 1-9. Https://Doi.Org/10.1016/J.Arth.2006.11.007

Rasyid, A. (2016). Analisis Potensi Sektor Potensi Pertanian Di Kabupaten Kediri Tahun 2010-2014. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *14*(1), 100–111. Https://Doi.Org/10.22219/Jep.V14i1.3889

Rey-Maquieira, J., Lozano, J., & Gómez, C. M. (2009). Quality Standards Versus Taxation In A Dynamic Environmental Model Of A Tourism Economy. *Environmental Modelling And Software*, *24*(12), 1483–1490. Https://Doi.Org/10.1016/J.Envsoft.2009.05.012

Richard, B., & Cleveland, S. (2016). The Future Of Hotel Chains : Branded Marketplaces Driven By The Sharing Economy. *Journal Of Vacation Marketing*, 1–10. Https://Doi.Org/10.1177/1356766715623827

Roostika, R. (2012). Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran Produk Cindera Mata Terhadap Kepuasan Wisatawan Domestik Di Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, *1*(3), 104–116.

Safwan, Nadirsyah, & Abdullah, S. (2014). Pengaruh Kompetensi Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya. *Jurnal Akuntansi*, *3*(1), 133–139.

Sudiana, I. B. A. B. W. I. K. (2016). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Penerimaan Pajak Hotel, Restoran Dan Pendapatan Retribusi Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bangli Periode 2009-2015. *E- Jurnal Ep Unud*, 5(12), 1384-1407.

Suleman, D. (2018). Kontribusi Pajak Hotel Terhadap (Pad) Dispenda Kabupaten Bogor. *Jurnal Moneter*, *V*(1), 57–62.

Suliswanto, M. S. W. (2010). Pengaruh Produk Domestik Bruto (Pdb) Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Angka Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *8*(2), 357–366.

Sumarabawa, I. G. A. Dkk. (2013). Ketersediaan Aksesibilitas Serta Sarana Dan Prasarana Pendukung Bagi Wisatawan Di Daerah Wisata Pantai Pasir Putih, Desa Prasi, Kecamatan Karangasem. *Jurnal Pendidikan Geografi*, *3*(1), 1–14. Retrieved From Ejournal.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/Jjpg/Article/Download/1220/1084, Diakses 03 Juni 2017

Supit, N. L., Kumenaung, A. G., & Tumilaar, R. L. H. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *15*(03), 198–209.

Suryadana, M. Liga, & Octavia, Vanny. (2015). *Pengantar Pemasaran Pariwisata*. Bandung: Cv. Alfabeta.

Susanti, S. (2013). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Jawa Barat Dengan Menggunakan Analisis Data Panel. *Jurnal Matematika Integratif*, *9*(1), 1-18. Https://Doi.Org/10.24198/Jmi.V9.Nl.9374.1-18

Susepti, A., Hamid, D., & Kusumawati, A. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Tamu Hotel (Studi Tentang Persepsi Tamu Hotel Mahkota Plengkung Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Administrasi Bisnis*, *50*(5), 27–36.

Sutrisno, D. C. (2013). Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Hotel, Dan Pdrb Terhadap Retribusi Pariwisata Kabupaten / Kota Di Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*, *2*(4), 435–445.

Thompson, A., & Thompson, H. (2010). Research Note : The Exchange Rate , Euro Switch And Tourism Revenue In Greece. *Tourism Economics*, *16*(3), 773–780.

Toma, M., Mcgrath, R., & Payne, J. E. (2016). Hotel Tax Receipts And The 'Midnight In The Garden Of Good And Evil': A Time Series Intervention Seasonal Arima Model With Time-Varying Variance. *Applied Economics Letters*, *16*(May), 653–656. Https://Doi.Org/10.1080/13504850701221808

Udayantini, K. D., Bagia, I. W., & Suwendra, I. W. (2015). Pengaruh Jumlah Wisatawan Dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Pendapatan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Buleleng Periode 2010-2013. *E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*, *3*(1).

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi

Daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

Wandira, A. G. (2013). Pengaruh Pad, Dau, Dak, Dan Dbh Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, *2*(1), 44–51.

Wati, M. R., & Fajar, C. M. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, *1*(1), 63–76.

Website: Www.Bandungkota.Bps.Go.Id *Data Pdrb Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Bandung.* Diunduh Tanggal 21 Mei 2019 Jam 17.10.

Wertianti, I. G. A. G., & Dwirandra, A. A. N. B. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pada Belanja Modal Dengan Pad Dan Dau Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, *4*(3), 567–584.

Widiana, I. N. W., & Sudiana, I. K. (2015). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hotel Restoran Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ep Unud*, *4*(11), 1357–1390.

Widyaningsih, P., & Budhi, M. K. S. (2014). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pendapatan Asli Daerah. *E-Jurnal Ep Unud*, 3(4), 155-163.

Wildan, A. (2018). Pengaruh Tamu Hotel

, Ihk Dan Tenaga Kerja Hotel Terhadap Penerimaan Pajak. *Economics Development Analysis Journal*, *7*(1), 39–44.

BIODATA PENULIS

Muhamad Fikri Nur Afrizal merupakan mahasiswa akuntansi di Universitas BSI Bandung.